

DINAMIKA PEMBARUAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA TAHUN 1908 - 2024 (DALAM ASPEK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PESERTA DIDIK)

Ahmad Ainur Rizqi

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: ahmadainurrizqi@staisenorituban.ac.id

Abstract

Educational institutions in Indonesia have a long history, starting from before the independence of the Indonesian State, namely during the Dutch colonial period and the Japanese colonization, this study uses the library research methodology, so that in collecting the data can be interpreted using a qualitative research approach. Islamic education in Indonesia began during the colonial period by using a learning system in surau, mosques, and "pondok pesantren", this education system is still traditional and has not been systematized as it is now. The renewal of Islamic Education in Indonesia began when the Dutch established formal schools which at that time the students were still mostly from the nobility and the rich, then several Islamic institutions established Islamic religious-based schools and received challenges and even rejection from the Dutch government, during the Dutch colonial period the renewal of Islamic Education in Indonesia began to be noticed by the Japanese government until then Indonesia Merdeka Islamic Education was fully considered by the government until 2024, although there were many curriculum changes but Islamic Education still received special attention by the Indonesian government.

Keywords: Updates, education, Learners

Pendahuluan

Sekolah di Indonesia kini terdiri dari lembaga pendidikan mulai dari sekolah dan madrasah negeri maupun swasta, yang terdiri dari berbagai jenjang, dari Pendidikan Anak Usia Dini, TK, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi. Lembaga lembaga tersebut muncul dan berkembang di Indonesia semenjak Indonesia belum merdeka hingga saat ini, tentunya ada berbagai kejadian yang melatarbelakangi berdirinya lembaga lembaga pendidikan tersebut. Seperti yang kita pahami saat ini, bahwa pendidikan Islam dimulai ketika datangnya para saudagar yang menyebarkan agama Islam di semenanjung malaka dan Aceh. Dengan adanya penyebaran Islam tersebut secara tidak langsung terjadi proses pembelajaran pengetahuan tentang agama Islam. Di titik awal inilah proses pembelajaran tentang Islam sudah dilakukan oleh para pedagang maupun pendatang dari luar Nusantara atau Indonesi. Dari sinilah perkembangan Islam semakin mnyebar sehingga perlu kiranya wadah untuk memberi pengetahuan tentang Islam, pada awalnya pembelajaran agama Islam hnaya dilakukan di surau, dan berkembang di pondok pesantren, dan saat ini pendidikan islam juga dilaksanakan di sekolah formal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Perkembangan lembaga Pendidikan Islam secara formal atau klasikal dimulai pada masa penjajahan Belanda tepatnya diawal tahun 1900an yang dipakarsai oleh tokoh-tokoh pejuang pendidikan Indonesia diantaranya K.H Ahmad Dahlan dan tokoh lainnya. Sampai saat ini bentuk

pendidikan Islam di Indonesia tetap eksis diberbagai lembaga pendidikan. Dengan adanya latar belakang tersebut menarik bagi penulis untuk menguraikan bagaimana perubahan dan inovasi pendidikan Islam di Indonesia dari masa sebelum kemerdekaan hingga saat ini di tahun 2024.

Metodologi

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan library reserch (penelitian pustaka), penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan menghimpun dari berbagai literatur (Rosyidah & Ridlwan, 2022). Literatur yang diteliti tidak terbatas hanya dengan buku-buku tetapi dapat juga berupa dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar. Dalam penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti (Azmar, 2001).

Menurut Zed Mestika, penelitian pustaka adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan pengolahan materi dari koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika, 2004). Sedangkan Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen catatan kisah-kisah Sejarah untuk mendapatkan data (Sholeh, 2005). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia bersifat interdisipliner (Anggito, 2018). Penelitian kualitatif disebut juga dengan *interpretativereserch*, *naturalisticserch*, atau *phenomenological reserch*, pendekatan kualitatif menekankan makna, dan definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), itu juga lebih banyak meneliti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Rukin, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Kata “pembaruan” dari segi Bahasa atau etimologis berasal dari kata “Baru” yang berarti belum pernah ada sebelumnya. Kemudian mendapat tambahan awalan “pe” dan “an” diakhir sehingga menjadi kata baku pembaruan yang berarti proses, cara dan perbuatan membarui (Idris, 2015).

Sedangkan pengertian pembaruan dalam KBBI diartikan sebagai perbuatan (cara dan sebagainya) memperbaiki. Oleh karena itu, dalam konteks Bahasa, istilah “pembaruan” memiliki arti yang luas. Yaotu setiap Upaya yang mengandung elemen yang memperbaiki segala sesuatu. Karena masalah yang diperbarui itu luas, setiap elemen memerlukan kosakata yang khusus. Pembaruan yang dilakukan pada benda fisik, seperti memperbaiki bangunan. Maka digunakan kosakata renovasi, restorasi atau new production. Apabila pembaruan yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat non fisik digunakan kata inovasi, modeling, revival, dan modernization.

Pembaruan atau modernisasi dalam istilah yang digunakan dalam Masyarakat barat untuk menggambarkan proses, Gerakan, dan Upaya untuk mengubah nilai-nilai tradisi, institusi lama untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern (Nata, 2019).

Pembaruan ini akhirnya selalu terjadi pada setiap masanya termasuk dalam agama, pendidikan, adat istiadat dan budaya. Terkhusus pembaruan dalam agama Islam adalah yang diperbarui bukanlah ajaran dasar baik ayat ataupun hadits, namun yang diperbarui yakni interpretasi atau hasil pemahaman atas teks ayat atau hadits tersebut. Bukan ayat dan hadits tersebut. Pembaruan dalam Islam dapat diartikan sebagai pikiran atau gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan zaman serta kemajuan

teknologi. Sebab pada sejatinya zaman akan selalu terjadi perubahan dan modernitas yang tidak bisa dihindari, karena manusia mempunyai pemikiran dan pengembangan akan sesuatu hal. Maka pembaruan sejatinya akan terus terjadi selamanya.

Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia yang dilakukan di Indonesia adalah tanggapan progressif dan inovatif terhadap kebijakan diskriminatif pemerintahan Hindia Belanda yang membatasi gerak langkah pendidikan Islam. Ini ditunjukkan oleh isi perubahan dalam pendidikan Islam yang dilakukan dengan mengadopsi model Pendidikan kolonial Belanda, yaitu pendidikan formal dalam bentuk kelas, yang dilengkapi dengan gedung, kelas, kurikulum bidang umum di samping bidang agama (Nata, 2019). Dengan demikian pembaruan pendidikan Islam di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengakomodir segenap potensi peserta didik dengan memperjuangkan terwujudnya misi ajaran Islam dengan menyebarkan rahmatan lil alamain, serta bernilai ibadah dan demi kemajuan umat muslim di seluruh dunia.

Siswa atau peserta didik adalah salah satu unsur dalam proses Pendidikan, dalam Pendidikan terdapat beberapa unsur yaitu siswa atau peserta didik, pendidik, serta sarana dan prasarana.

Pentingnya unsur peserta didik dalam pendidikan membuat status peserta didik adalah perhatian khusus yang menjadikannya sasaran dalam proses pembelajaran sebagai penerima pengetahuan. istilah lain untuk peserta didik antara lain adalah al-shabiy yang berarti anak-anak, murid yang berarti orang yang menginginkan atau membutuhkan, al-muta'allim berarti pelajar, thalib ilmin yang berarti penuntut ilmu pengetahuan, tilmiz yang berarti murid-murid dan thifl yang berarti orang yang berhajat. Peserta didik adalah individu atau sekelompok orang yang tengah membutuhkan bimbingan, pengarahan dan pengetahuan. Peserta didik akan menjadi baik atau buruk tergantung pada lingkungan dan gurunya karena dia dilahirkan suci dan bebas dari semua dosa. Abidun Nata mengatakan bahwa seseorang yang tengah mencari ilmu memerlukan kesiapan fisik yang baik, akal yang sehat, pikiran yang jernih, dan jiwa yang tenang, oleh karena itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan potensi dan alat indra, fisik, mental yang diperlukan untuk mencari ilmu.

Peserta didik berfungsi sebagai objek dan subjek pendidikan. Mereka menerima perlakuan-perlakuan tertentu jadi mereka berfungsi sebagai objek dan subjek. Namun, dalam pendidikan kontemporer peserta didik lebih dianggap sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Pembaharuan pendidikan yang dikenal sebagai "Student Centered Approach" berfokus pada kepentingan siswa atau peserta didik. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk menghasilkan siswa yang ideal. Untuk mencapai tujuan ini, sistem pendidikan atau prosedurnya dapat diubah. Artinya, pembaruan peserta didik berawal dari pembaruan input melalui seleksi yang ketat (Zaenudin, Lc., 2015).

Pembaruan Pendidikan Islam Indonesia Sebelum Kemerdekaan

1. Pembaruan Pendidikan Islam masa Penjajahan Belanda

Pada masa kolonial Belanda, Pendidikan Islam sebetulnya sudah berlangsung melalui sistem Pendidikan di masjid dan pesantren, belum tersistem klasikal seperti pada saat ini di, yang tidak hanya di pesantren namun juga di sekolah-sekolah madrasah dan juga sekolah umum terdapat materi tentang Pendidikan Islam. Pada awal tahun 1900.an menjadi salah satu perkembangan Pendidikan yang ada di Hindia Belanda kala itu, banyak sekolah-sekolah didirikan yang menjadi cikal bakal sistem pembaruan Pendidikan Islam seperti sekarang. Beberapa sekolah didirikan oleh Hindia Belanda diantaranya adalah:

a. *Volkschool*

Sistem sekolah jawa bisa dikatakan dimulai pada tahun 1907 ketika Belanda mendirikan 122 sekolah desa tiga tahun, yang kemudian dikenal sebagai *Volkschool*. Sekolah-sekolah ini dapat ditemukan diberbagai tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dalam pembelajarannya, Bahasa Jawa digunakan sebagai pengantar bukan Bahasa Belanda. Mereka yang telah lulus sekolah ini memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke “sekolah lanjutan” yang disebut *Varvelgschool*, yang biasanya terletak di distrik atau kabupaten (Rohani dkk., 2022). Sehingga pada masa ini banyak sekolah yang berada di pedesaan agar dapat dijangkau oleh masyarakat yang ada di desa, sedangkan sekolah *Varvelgschool* biasanya ada di kabupaten atau distrik sebagai sekolah lanjutan bagi yang telah selesai di *Volkschool*. Kemudian setelah adanya sekolah sekolah di desa-desa, Belanda mendirikan beberapa sekolah lainnya.

b. *Holland-Inlanshe School* (HIS)

Holland-Inlanshe School yang didirikan pada tahun 1912. Kurikulum sekolah berlangsung selama tujuh tahun dalam pendidikannya dan ditujukan untuk siswa Indonesia yang berasal dari keluarga terkemuka baik dari segi pekerjaan, keturunan, penghasilan dan Pendidikan (Rohani dkk., 2022). Jika *Volkschool* dalam pengantarnya menggunakan Bahasa Jawa namun pada sekolah *Holland-Inlandshe School* menggunakan Bahasa Belanda dalam proses pendidikannya. Dalam pengelolaan peserta didiknya HIS hanya untuk bangsawan atau anak dari pejabat dan juga bagi orang kaya yang berpenghasilan tinggi.

c. *Schakeschool* atau sekolah sambungan yang didirikan pada tahun 1921. Lama belajar pada sekolah ini adalah 3 tahun dengan menggunakan Bahasa Belanda.

d. *Europa Lagere School*, sekolah ini setingkat dengan SD bagi anak-anak Belanda (Rohani dkk., 2022).

Pada tahun 1900-an sekolah-sekolah Belanda banyak didirikan di Jawa dan beberapa wilayah lainnya oleh pemerintahan Hindia Belanda. Terlepas dari fakta bahwa banyak orang Islam berbondong-bondong untuk masuk ke lembaga Pendidikan Belanda, lembaga-lembaga tersebut menjanjikan lapangan kerja yang signifikan bagi para alumninya. Meskipun begitu, para ulama meresahkan keberadaan sekolah ini karena dikhawatirkan siswanya akan menjadi orang-orang pintar yang sekuler, secular dan penganut kebudayaan Barat.

Dalam ordonansi, pemerintah Belanda bersikap netral terhadap Pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Pengajaran umum adalah netral, yang berarti pengajaran diberikan dengan menghormati keyakinan agama setiap orang. Pendidikan agama hanya boleh diberikan diluar kelas. Sedangkan di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren-pelajaran yang diberikan adalah pendidikan agama yang berasal dari kitab-kitab klasik. Dengan demikian *suasana pendidikan dikotomis* itu amat nyata di zaman penjajahan Belanda. Berkaitan dengan itu kedua lembaga pendidikan ini (sekolah dan pesantren) memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan *output* yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Sistem Pendidikan umum dan agama muncul pada tahun-tahun terakhir abad ke-19 karena perbedaan yang tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Sistem-sistem ini kemudian dilanjutkan dan diperkuat pada abad ke-20.

Perkembangan berikutnya adalah ordonansi tahun 1925, yang mengharuskan guru agama untuk memberi tahu bukan meminta izin. Pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang menetapkan bahwa orang yang memberi pengajian Islam harus mendapat izin dari Pemerintah Belanda terlebih dahulu, peraturan ini lebih fokus pada pendidikan Islam bahwa tidak semua kyai dapat mengajar mengaji, kecuali sudah mendapat rekomendasi. Selanjutnya pada tahun 1932 M dikeluarkan peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau mengadakan pelajaran yang tidak disukai pemerintah kolonial Belanda.

Meskipun Pendidikan Islam melalui pondok pesantren sudah ada pada masa itu, namun sekolah formal yang berbasis agama Islam belum begitu banyak. Pendidikan Islam antara lain:

- a. *Jamiat Khair* yang didirikan di Jakarta pada 17 Juli 1905. Organisasi ini mendirikan sekolah dasar, yang menawarkan Pelajaran umum dan agama. Berhitung, Sejarah dan ilmu bumi adalah contoh ilmu umum. Kurikulumnya di Kelola dengan cara modern, yakni dengan menggunakan sistem kelas. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan Bahasa melayu. Organisasi ini memprioritaskan dua bidang kegiatan: mendirikan dan membina satu sekolah setingkat sekolah dasar dan mengirimkan fremaja ke turki untuk melanjutkan studi. Karena tidak seorangpun dari mereka yang dikirim ke Timur Tengah melakukan peran yang signifikan setelah mereka Kembali ke Indonesia, sehingga bidang kedua tersebut sering terhambat (Idris, 2015).
- b. Al-Islah Wal Irsyad, perkumpulan Al-Islah wa Irsyad, yang terdiri dari orang arab bukan alawi, didirikan pada tahun 1914 dan kemudian dikenal dengan Al-Irsyad. Pada tahun 1915, sekolah Al Irsyad pertama di Jakarta didirikan, Al-Irsyad berfokus pada Pendidikan, terutama untuk Masyarakat Arab dan permasalahan yang muncul di Masyarakat Arab, meskipun orang-orang Islam Indonesia bukan Arab menjadi anggotanya (Idris, 2015). Dengan kata lain Lembaga Pendidikan Al Irsyad dikhususkan untuk peserta didik dari keturunan Arab yang ada di Indonesia, meskipun ada orang asli Indonesia di dalamnya namun mayoritas adalah orang Arab.
- c. Persyarikatan Ulama, persyarikatan Ulama didirikan tahun 1911 di Majalengka Jawa Barat, yang di pelopori oleh Haji Abdul Halim. Sekolah yang didirikan oleh organisasi ini awalnya hanya untuuk orang dewasa dengan 60 siswa dengan materi yang diberikan fiqh dan hadist, tetapi setahun kemudian siswanya mulai meningkat. Kemudian didirikan pesantren dengan sisitem madrasah atau sistem kelas yang memiliki 5 kelas. Bahasa Arab adalah sebagai Bahasa pengantarnya. Organisasi ini mendirikan “santri asrama” dengantiga tingkatan: pemula, dasar, dan lanjutan pada tahun 1932. Para siswa di “santri asrama” ini tidak hanya diberi pengetahuan agama dan umum saja, tetapi juga diajarkan ketrampilan khusus, seperti pertanian dan menejemen berbagai bahan seperti pembuatan sabun, dan sebagainya.
- d. Muhammadiyah, pada Tahun 1912 Muhammadiyah mendirikan madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tahun 1912, K.H Ahmad Dahlan memulai Gerakan pendidikannya. Beliau menggujnakan rumahnya untuk memberi pengajaran kepada anak-anak yang berada di sekitar Kauman dengan menggunakan sistem sekolah. Muhammadiyah memperlakukan Pendidikan Islam secara modern. Sebgaai organisasi dakwah dan Pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga Pendidikan dari Tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Sekolah sekolah umum meliputi sekolah kelas dua, sekolah shakel, HIS, MULO, AMS dan Hollands Inlands Kwekschool (HIK) yang semuanya diberikan Pendidikan umum dan keagamaan sekaligus. Pada tahun 1925, Muhammadiyah telah memiliki sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 14 Madrasah, 32 Buah Sekolah dasar lima tahun, delapan HIS, dan seluruh jumlah siswanya 4000 dan jumlah gurunya 119, pada tahun 1935, Muhammadiyah mampu mendirikan 834 masjid dan langar (mushola), 31 perpustakaan umum, dan 1.774 lembaga Pendidikan Islam.
- e. Nahdlatul Ulama, setelah NU berdiri pada tahun 1926, NU memiliki program permanen yang mengurus bidang madrasah dan sekolah yang diberi nama Lembnaga Pendidikan Ma'arif. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pendidikan NU di Tingkat pengurus wilayahm, pengurus Cabang, dan Pengurus Wakil Cabang (Ulama, 2014).

2. Pembaruan Pendidikan Islam masa Penjajahan Jepang

Setelah Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan besar, termasuk jenis sekolah, kurikulum, dan bahasa pengantar menggunakan Bahasa Indonesia tidak lagi menggunakan Bahasa Belanda. Sekolah-sekolah pada masa penjajahan Jepang diantaranya adalah:

- a. Sekolah Rakyat (Kokumin Gakko): Sekolah dasar yang ditempuh selama enam tahun. Sebelumnya, sedangkan sekolah dasar di masa Hindia Belanda ditempuh selama tiga atau lima tahun.
- b. Sekolah Menengah Pertama (Shoto Chu Gakko): Sekolah menengah ini ditempuh waktu selama tiga tahun proses pembelajarannya.
- c. Sekolah Menengah Atas (Koto Chu Gakko): Sekolah menengah yang ditempuh selama tiga tahun.
- d. Sekolah menengah kejuruan: Sekolah yang mempelajari bidang-bidang seperti teknik, pertanian, pertukangan kayu, perkapalan, dan pengajaran.

Selain itu, Jepang juga melakukan beberapa kebijakan terkait pendidikan, seperti:

- a. Menghapuskan penggunaan bahasa Belanda, Inggris, dan Prancis di sekolah.
- b. Mengubah kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran baru, seperti bahasa Jepang, pendidikan jiwa/mental, pendidikan jasmani, dan kegiatan kejuruan.
- c. Melakukan akreditasi kepada sekolah yang ada dan menutup sebagian besar sekolah yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Jepang.

Pendidikan Islam selama penjajahan Jepang sangat terkait dengan hubungan saling membutuhkan antara Jepang dan umat Islam di Indonesia, Jepang membutuhkan umat Islam terkait Perang Asia Timur Raya, agar pihak Jepang mendapatkan bantuan dari umat Islam (Putra Dulay, 2018).

Pada masa penjajahan Jepang, lembaga pendidikan yang berbasis Islam masih diawasi oleh pemerintah Jepang, namun tidak seketat ketika masa penjajahan colonial Belanda, Jepang juga memberi bantuan kepada madrasah dan juga membuka kembali madrasah yang pernah di tutup ketika saat penjajahan Belanda. Karena pada masa penjajahan Belanda, kegiatan-kegiatan masyarakat pribumi di awasi dengan ketat, termasuk kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan Islam dan Pribumi.

Pada awalnya Jepang memprioritaskan pengembangan pendidikan Islam bagi umat Islam di Indonesia, terutama syiar Islam, ini adalah strategi yang digunakan Jepang untuk menangani perang dunia kedua dan tekanan dari sekutu, justru Jepang menunjukkan bahwa mereka adalah penjajah yang lebih kejam dari Belanda. Rakyat dipaksa untuk bergabung dengan badan pertahanan Jepang sehingga pendidikan rakyat terbengkalai. Meskipun dilarang oleh Jepang, masih ada madrasah yang tetap beroperasi di lingkungan pesantren yang jauh dari jangkauan Jepang, ini karena pesantren biasanya terletak di daerah terpencil (Susmihara, 2013). Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan madrasah dan sekolah bisa berlangsung, sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

Pembaruan Pendidikan Islam Setelah Kemerdekaan

Setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah terlepas dari penjajahan Jepang, sehingga Indonesia mempunyai kebijakan sendiri dalam mengatur segala bentuk lini pemerintahan yang di pimpin oleh Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno. Termasuk dalam bidang Pendidikan, karena Pendidikan adalah salah satu hal pokok dalam menumbuhkan generasi-generasi penerus perjuangan bangsa.

Setelah Ir. Soekarno di gantikan oleh Soeharto sebagai Presiden maka kebijakan tentang Pendidikan juga terdapat pembaruan dan inovasi dalam berbagai aspek

pendidikan.

1. Pembaruan Pendidikan Pada Masa Orde lama

Secara kontekstual periode orde lama adalah masa kepemimpinan Ir. Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia, yang menjadi awal kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1965. Sebagai negara yang baru berdiri maka perlu penyesuaian-penyesuaian kebijakan di berbagai hal, termasuk juga dalam bidang Pendidikan.

Dalam UU No 4 tahun 1950 bab XII pasal 20 mengatur secara khusus pelaksanaan pendidikan agama. UU tersebut berisi tentang diadakannya pelajaran agama di sekolah negeri, orang tua murid dapat menetapkan anaknya mengikuti pelajaran agama atau tidak.

Kemudian pada tanggal 20 Januari 1951 menteri agama dan menteri pendidikan menerbitkan peraturan yang mengatur pendidikan agama di sekolah. Pada pasal 1 peraturan tersebut menyatakan bahwa semua sekolah rendah dan lanjutan diwajibkan untuk memberikan Pendidikan agama. Pada pasal 2 huruf a menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah rendah dimulai sejak kelas 4 dengan jumlah 2 jam per minggu, sementara huruf b menyatakan bahwa pendidikan agama di lingkungan istimewa dapat diberikan mulai kelas 1 dengan jumlah jam sesuai kebutuhan. Namun tidak lebih dari 4 jam dalam seminggunya. Ketentuannya bagi sekolah rendah, mutu dari pengetahuan umum tidak boleh ada pengurangan dibanding sekolah rendah pada lingkungan lainnya.

Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan agama pada SLTP dan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) umum atau kejuruan diberikan pendidikan agama selama 2 jam setiap minggunya, dan pada pasal 4 huruf a disebutkan bahwa pendidikan agama yang diberikan menyesuaikan dengan agamanya masing-masing, kemudian pada pasal 4 huruf b disebutkan bahwa pendidikan agama hanya akan diberikan kepada kelas yang memiliki murid paling sedikit 10 orang dengan menganut suatu agama. Selanjutnya, pasal 4 huruf c menyatakan bahwa jika ada seorang siswa yang menganut agama yang berbeda dan sedang diajarkan suatu agama yang berbeda, siswa tersebut diijinkan untuk meninggalkan kelas saat Pelajaran berlangsung. (Putra Dulay, 2018).

Pengembangan dan pembinaan madrasah serta Pendidikan Islam di sekolah umum adalah dia hal penting yang berkaitan dengan Pendidikan Islam masa orde lama. Perkembangan madrasah dipengaruhi oleh peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara teoritis telah meningkatkan posisi madrasah sehingga terus menarik perhatian pengambil kebijakan.

Pada tahun 1950, negara Indonesia secara resmi mengakui Madrasah sebagai lembaga pendidikan. Undang Undang no 4 tahun 1950 menetapkan dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di institusi Pendidikan. tentang dasar dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah, menurut pasal 10 madrasah harus memberi Pelajaran agama sebagai mata Pelajaran utama setidaknya enam jam seminggu selain Pelajaran umum untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama.

Dengan mengacu persyaratan tersebut, pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang.

- a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) 6 tahun
- b. Madrasah Tsanawiyah Pertama 4 tahun
- c. Madrasah Tsanawiyah Atas 4 Tahun

Berdirinya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) adalah perkembangan madrasah yang cukup signifikan di abad pertengahan. Tujuan pendirinya adalah untuk menghasilkan profesional yang mampu membangun madrasah dan juga ahli keagamaan yang profesional. PGA sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan. Pendiriannya oleh Departemen Agama di wilayah minangkaabau, dan menjadi jaminan strategis bagi kelangsungan madrasah di Indonesia (Sismawati Sismawati dkk., 2024).

2. Pembaruan Pendidikan Pada Masa Orde baru

Dalam sistem pendidikan nasional mulai masuk Pendidikan Islam. Hal ini dimulai dengan diterbitkannya surat Keputusan Bersama Tiga Menteri atau bisa disebut sebagai SKB 3 Menteri, yaitu yang terdiri dari Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Di dalam SKB 3 Menteri tersebut antara lain dinyatakan bahwa lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan umum dan sebaliknya, berhak mendapatkan bantuan sarana prasarana, biaya, dan diakui ijazahnya. Dengan Keputusan SKB 3 menteri ini menetapkan status sekolah berbasis Islam yaitu madrasah disamakan dengan sekolah berikut jenjangnya meliputi, Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan Tingkat SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, Madrasah Aliyah (MA) Setara dengan SMA. Pada sekolah madrasah selain mengajarkan pembelajaran agama tapi juga mengajarkan pembelajaran Pelajaran umum, yang persentasinya 70% mata Pelajaran umum dan 30% mata Pelajaran agama.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 juga memasukkan Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional, mulai dari taman kanak-kanak (TK), hingga perguruan tinggi, dan diberi peraturan yang sama dalam hal bantuan keuangan dan sumber daya manusia (SDM).

Pada pendidikan orde baru merupakan pembaruan dari Pendidikan orde lama. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada masa orde lama disesuaikan Kembali dengan Pelajaran agama. Pada masa ini Pendidikan agama sudah ditetapkan menjadi mata pelajaran yang harus diajarkan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Fauzi, 2023).

3. Masa reformasi

Dibandingkan dengan periode sebelumnya, pada masa reformasi pendidikan mempunyai ruang gerak yang lebih luas dan berkembang. Pada masa ini, Pendidikan juga lebih berfokus pada pertumbuhan anak didik. Bahkan, masing-masing daerah diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan pendidikan yang diatur sebelumnya oleh pusat. Beberapa kurikulum yang dibuat selama masa reformasi diantaranya, kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka (Fauzi, 2023).

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah rencana dan peraturan tentang kompetensi hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan lebih banyak pada kemampuan yang harus dimiliki siswa. Oleh karena itu, kurikulum ini berfokus pada kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk memasuki dunia industri.

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Kurikulum KTSP didasarkan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 dan menetapkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kepala sekolah menetapkan kurikulum ini dengan mempertimbangkan saran dari komite sekolah. Karena KTSP masih merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kompetensi, maka lebih mendorong kearifan lokal dalam pendidikan, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka berdasarkan rancangan pengetahuan secara terbuka berdasarkan rancangan sistem yang disesuaikan oleh masing-masing sekolah.

c. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2013/2014. Kurikulum 2013 tidak langsung diaplikasikan ke seluruh sekolah di Indonesia, namun melalui beberapa proses dan sosialisasi kepada guru dan peserta didik. Sehingga dalam

pengimplementasinya setiap daerah bisa berbeda-beda jangka waktunya, bagi sekolah yang belum menggunakan kurikulum 2013 pada saat itu, maka menggunakan kurikulum sebelumnya yakni kurikulum KTSP.

Kurikulum 2013 dikenal dengan kurikulum berbasis karakter. Pendidikan yang dilaksanakan melalui kurikulum ini tidak hanya menitikberatkan pada bidang akademik saja, melainkan juga pada peningkatan budi pekerti dan akhlak mulai peserta didik. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum 2013 salah satu fokusnya adalah menekankan pada karakter peserta didik, sehingga diharapkan menjadi pribadi yang kreatif, inovatif dan juga produktif.

d. Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum yang menjadi perhatian utama oleh Kemendikbud Ristek untuk diterapkan pasca pandemi Covid-19. Merdeka belajar sebagai istilah dalam kurikulum Merdeka merupakan model yang lebih menekankan pada minat serta bakat peserta didik atau siswa. Kurikulum Merdeka merupakan kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Serta berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakter Utamanya adalah:

- a. Pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan soft skill dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila
- b. Berkonsentrasi pada materi penting sehingga cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam tentang ketrampilan dasar seperti literasi dan numerasi
- c. Fleksibilitas bagi guru dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa dan menyesuainya dengan konteks muatan lokal.

Penutup

Bentuk pendidikan Indonesia saat ini telah melalui banyak perubahan, dan berubah itu terjadi karena berbagai kebijakan dan social budaya sesuai jamannya. Hal itu juga yang terjadi pada bentuk dan sistem pendidikan di Indonesia yang mengalami pembaharuan dan inovasi dari masa penjajahan sampai sekarang. Dari awal munculnya sekolah-sekolah Belanda yang lebih memprioritaskan kalangan Belanda dan pejabat pada waktu itu, meskipun ada beberapa lembaga sekolah yang terdapat di desa desa seperti *Volkschool* namun pada masa penjajahan Belanda, lembaga atau pendidikan Islam dibatasi dengan ketat bahkan ada beberapa madrasah yang ditutup oleh Belanda. Setelah terbebas dari Belanda, lembaga pendidikan Islam mendapat perhatian dan kelonnggaran dari Jepang, hingga madrasah dapat bantuan pembiayaan dari pihak Jepang. Pembaruan sistem pendidikan di Indonesia pada masa kemerdekaan lebih diperhatikan, dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung keberlangsungan pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian dinamika pembaruan dalam pendidikan Islam di Indonesia sangat dipengaruhi dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- Anggito, A. & J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak.
- Azmar, S. (2001). *Metdologi Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2023). *Landasan Pendidikan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Idris, S. (2015). Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia (Studi Analisis Tokoh, Organisasi, dan Lembaga Pendidikan). *Jurnal Ilmiah "Kreatif," XII(2)*, 7–10.
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia.
- Nata, A. (2019). *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Prenadamedia.

- Putra Dulay, H. (2018). *Sejarah Pertumbuha dan Pembaruan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Rohani, R., Ernita, M., & Salmiah, S. (2022). Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda (Kasus Muhammadiyah Dan NU). *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 18(2), 103. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v18i2.21483>
- Rosyidah, I., & Ridlwan, M. (2022). Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ki Hajar Dewantara Dan Paulo Freire Dalam Kritik Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 79–88. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v12i01.3917>
- Rukin. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakad Media Publishing.
- Sholeh, A. R. (2005). *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sismawati Sismawati, Muhammad Taraki, Kasful Anwar US, & Sya'roni Sya'roni. (2024). Kebijakan Pendidikan Pemerintahan Orde Lama Serta Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 303–315. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.543>
- Susmihara. (2013). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang. *Jurnal Rihlah*, 1(1), 1–23.
- Ulama, N. (2014). *Mahrus As"ad*. 3(02), 209–245.
- Zaenudin, Lc., M. (2015). Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(Desember), 1–16.